



Jurnal Komunikasi dan Bisnis (KOMBIS)

e-ISSN:3062 - 6889

INFLASI DI INDONESIA DALAM PERKEMBANGAN DAN PENGENDALIANNYA

Muhamad Afrizal Maulana^{1,*}, Tiara Rizki Rozhah², Restina Septiani³, Endjelin V Amapoli⁴, Randy Muhamad⁵

¹Institut Manajemen Wiyata Indonesia

^{*}E-mail korespondensi: mafrizalmaulana088@gmail.com

Diterima: 090624 | Direvisi: 090624 | Disetujui: 120624 | Publikasi online: 120624

ABSTRACT

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga barang secara terus-menerus atau suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan tingkat harga secara umum. Perkembangan inflasi memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan suatu negara. Perkembangan inflasi di Indonesia menjadi satu dari berbagai masalah ekonomi makro yang cukup meresahkan. Maka dari itu, pengendalian inflasi begitu penting dan menjadi salah satu perhatian pemerintah karena inflasi bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan menggunakan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan pengendalian inflasi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan inflasi pada tahun 1998-2013 mengalami naik turun dan pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan moneter untuk mengendalikan tingkat inflasi.

Kata kunci: *Infalasi, Pengendalian Inflasi, Perkembangan Inflasi*

PENDAHULUAN

Fenomena inflasi masih menjadi salah satu dari permasalahan ekonomi yang meresahkan bagi pemerintah dan masyarakat di Indonesia. Tentunya, inflasi ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti misalnya kenaikan jumlah uang beredar dan adanya defisit anggaran belanja pemerintah (Atmadja 1999).

Inflasi merupakan peningkatan harga secara konstan dan kenaikan harga yang terjadi pada sebuah produk barang dan jasa. Tingginya tingkat inflasi atau peningkatan harga di suatu negara menggambarkan perekonomian negara tersebut. Semakin rendah tingkat inflasinya, maka akan semakin stabil keadaan ekonomi negara tersebut.

Pengendalian tingkat inflasi dapat menimbulkan pertanyaan apakah inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, atau inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Dalam sebuah literature, dijelaskan bahwa Bank Sentral Eropa telah menurunkan tingkat suku bunga untuk meningkatkan inflasi dan membangkitkan permintaan barang dalam negeri. Tujuannya adalah untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi.

Namun, kenaikan inflasi tidak hanya mengganggu pusat Bank Nasional, tetapi juga memiliki biaya output ekonomi yang tinggi. Inflasi juga berpengaruh terhadap penurunan tingkat investasi (Behera and Mishra 2017).

Salah satu dampak dari terjadinya inflasi adalah banyaknya jumlah pengangguran. Pengangguran merupakan keadaan ketika seseorang ingin bekerja namun tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Selain inflasi, kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, ledakan penduduk, dan kelangkaan investasi juga dapat menyebabkan banyaknya pengangguran.

Untuk menciptakan inflasi yang rendah dan stabil, diperlukan adanya kebijakan penargetan tingkat inflasi. Kebijakan ini harus menciptakan target yang kredibel atau sudah memperhitungkan konsekuensi dari menciptakan inflasi yang rendah. Mencapai target dari tingkat inflasi adalah tujuan utama dari kebijakan moneter. Selama inflasi berhasil dijaga sesuai targetnya, inflasi dan pengangguran akan tetap rendah dan stabil.

Menurut Friedman dan Schwartz, 1971 menyatakan bahwa “inflasi selalu ada dimana-mana dan merupakan fenomena moneter”. Tingkat inflasi didorong oleh tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar. Peningkatan jumlah uang beredar dapat berasal dari ekspansi moneter atau fiskal. Bank sentral menetapkan target suku bunga dan berupaya mencapai target untuk melalui berbagai alat manajemen pasokan uang. Perluasan pengeluaran defisit pemerintah dapat mendorong peningkatan jumlah uang beredar, karena peningkatan penjualan obligasi pemerintah terkait dengan defisit fiskal (Hung and Thompson 2016).

Dikutip dari jurnal oleh (Indriyani 2016), Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga barang secara terus-menerus atau suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan tingkat harga secara umum. Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada dipasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat beragam sehingga sebagian besar dari harga- harga barang tersebut selalu meningkat dan mengakibatkan terjadinya inflasi.

Sedangkan dari penelitian sebelumnya oleh (S. Kewal 2012), Inflasi didefinisikan sebagai suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus (Nanga, 2001 : 241). Berdasarkan definisi tersebut, kenaikan tingkat harga umum yang terjadi sekali waktu saja, tidaklah dapat dikatakan sebagai inflasi. Ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, komponen tersebut yaitu adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti bisa saja tingkat harga yang terjadi pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, kemudian kenaikan tingkat harga tersebut berlangsung secara terus menerus (*sustained*), yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja, akan tetapi bisa beberapa waktu lamanya, serta tingkat harga yang dimaksud adalah tingkat harga secara umum, yang berarti tingkat harga yang mengalami kenaikan itu bukan hanya pada satu atau beberapa komoditi saja, akan tetapi untuk harga barang secara umum.

TINJAUAN PUSTAKA

Latar belakang teori berisi teori-teori sebelumnya sebagai dasar penelitian dan hipotesis sementara. Teori tersebut dapat berupa artikel ilmiah, artikel dalam jurnal, buku teks, atau sumber tulisan ilmiah lainnya. Teori ini akan digunakan untuk memberikan state of the art naskah dari masalah penelitian yang telah diajukan. Teori yang harus digunakan terutama

adalah teori yang berkaitan dengan komunikasi. Teori-teori lain yang masih diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian untuk mendukung teori-teori yang disampaikan setelah teori komunikasi dibahas.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai perkembangan dan pengendalian inflasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik *literature review*, yakni metode yang sistematis untuk melakukan identifikasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu untuk menganalisis pengetahuan yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu artikel, skripsi, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam penelitian. Sumber didapatkan dari jurnal-jurnal ilmiah yang sitasinya berasal dari Google Scholar dan situs online lainnya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Inflasi

Dalam perjalanan ekonomi baik nasional dan global tidak lepas dari perkembangan inflasi yang memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan suatu negara. Seperti halnya negara-negara di dunia, perkembangan Inflasi di Indonesia menjadi satu dari berbagai masalah ekonomi makro yang cukup meresahkan pemerintah, terlebih bagi masyarakat pada umumnya. Menurut (Atmadja 1999) memaparkan bahwa, menjelang akhir pemerintahan Orde Baru (sebelum krisis moneter) angka inflasi tahunan dapat ditekan sampai pada single digit, tetapi secara umum masih mengandung kerawanan jika dilihat dari seberapa besar prosentase kelompok masyarakat golongan miskin yang menderita akibat inflasi. Lebih-lebih setelah semakin berlanjutnya krisis moneter yang kemudian diikuti oleh krisis ekonomi, yang menjadi salah satu dari penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru, angka inflasi cenderung meningkat pesat (mencapai lebih dari 75 % pada tahun 1998), dan diperparah dengan semakin besarnya presentase golongan masyarakat miskin. Sehingga bisa dikatakan, bahwa meskipun angka inflasi di Indonesia termasuk dalam katagori tinggi, tetapi dengan meninjau presentase golongan masyarakat ekonomi bawah yang menderita akibat inflasi cukup besar, maka sebenarnya dapat dikatakan bahwa inflasi di Indonesia telah masuk dalam stadium awal dari *hyperinflation*.

Menurut sudut pandang kaum moneteris jumlah uang beredar adalah faktor utama yang dituding sebagai penyebab timbulnya inflasi di setiap negara, tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia jumlah uang beredar ini lebih banyak diterjemahkan dalam konsep *narrow money* (M1). Hal ini terjadi karena masih adanya anggapan, bahwa uang kuasi hanya merupakan bagian dari likuiditas perbankan. Sejak tahun 1976 presentase uang kartal yang beredar (48,7%) lebih kecil dari pada presentase jumlah uang giral yang beredar (51,3%). Sehingga, mengindikasikan bahwa telah terjadi proses modernisasi di sektor moneter Indonesia. Juga, mengindikasikan bahwa semakin sulitnya proses pengendalian jumlah uang beredar di Indonesia, dan semakin meluasnya monetisasi dalam kegiatan perekonomian *subsistence*, akibatnya memberikan kecenderungan meningkatnya laju inflasi. Menurut data yang dihimpun dalam Laporan Bank Dunia, menunjukkan laju pertumbuhan rata-rata jumlah uang beredar di Indonesia pada periode tahun 1980- 1992 relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dan,

tingkat inflasi Indonesia juga relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya (kecuali Filipina). Kenaikkan jumlah uang beredar di Indonesia pada tahun 1970-an sampai awal tahun 1980-an lebih disebabkan oleh pertumbuhan kredit likuiditas dan defisit anggaran belanja pemerintah. Pertumbuhan ini dapat merupakan efek langsung dari kebijaksanaan Bank Indonesia dalam sektor keuangan (terutama dalam hal penurunan *reserve requirement*) fenomena.

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat inflasi. Inflasi merupakan peristiwa moneter yang sangat rentang dan sering dijumpai hampir pada semua negara di dunia. Inflasi juga dapat memberikan dampak yang buruk bagi neraca pembayaran di Indonesia. Dalam hal ini ketika inflasi tinggi maka akan menyebabkan harga komoditas ekspor naik sehingga kalah saing dengan harga komoditas negara lain. Keadaan ini akan menyebabkan jumlah ekspor menurun dan impor meningkat yang selanjutnya akan menyebabkan defisit perdagangan internasional yang selanjutnya berimbas pada pengurangan cadangan devisa. Pengurangan cadangan devisa ini akan menyebabkan kurangnya kepercayaan investor pada perekonomian nasional yang selanjutnya dapat menimbulkan *capital outflow* atau keluarnya modal dari dalam negeri. Meningkatnya penanaman modal asing tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor ekonomi. Salah satunya adalah suku bunga internasional yaitu LIBOR (*London Inter Bank Offering Rate*). Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menganut sistem perekonomian terbuka. Oleh karena itu, penanaman modal asing yang masuk kedalam negeri tidak saja ditentukan oleh tingkat bunga yang berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari faktor luar negeri yaitu melalui suku bunga internasional (LIBOR). LIBOR merupakan salah satu indikator moneter internasional yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan suku bunga di Indonesia. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kondisi perekonomian, terutama sektor moneter sangat terpengaruh oleh perekonomian dunia.

Penanaman Modal Asing (PMA) sendiri merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke sektor swasta baik melalui Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*) maupun investasi tidak langsung berbentuk portofolio. *Foreign Direct Investment* (FDI) oleh beberapa pengamat dianggap jauh lebih bermanfaat dibandingkan portofolio. Hal ini disebabkan karena efek yang diberikan dari FDI berupa modal, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi benar-benar dirasakan oleh negara. Berbeda dari portofolio yang sering disebut sebagai *bad cholesterol* karena sifatnya yang fluktuatif, tidak begitu berpengaruh signifikan terhadap pembangunan di sektor *real*, serta rentan terhadap kestabilan ekonomi (Arifin dkk, 2008:174-175) Meningkatnya pertumbuhan investasi di Indonesia dimulai ketika ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang No. 1/ tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang - Undang No. 6/ tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan direvisi kembali dengan undang undang terbaru yaitu Undang-Undang No. 25 tahun 2007 Pasal 12 tentang penanaman modal.

Berdasarkan jurnal yang disusun oleh (S. Tambunan, Yusuf, and Mayes 2015), menyatakan hasil penelitian perkembangan inflasi sebagai berikut :

Bank Indonesia sebagai salah satu lembaga negara yang independen dengan kebijakan moneternya, sangat berperan penting dalam menetapkan sasaran laju inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang-barang secara terus menerus dan secara umum ataupun universal. Sesuai dengan teori, tentunya dengan menjaga tingkat kestabilan dari inflasi diharapkan dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Berikut ini dapat dilihat perkembangan inflasi di Indonesia periode 1998-2013 pada tabel 1 :

Tabel 1. Perkembangan Inflasi di Indonesia periode 1998-2013

Tahun	Inflasi (%)
1998	77.63
1999	2.01
2000	9.35
2001	12.55
2002	10.03
2003	5.06
2004	6.40
2005	17.11
2006	6.60
2007	6.59
2008	11.06
2009	2.78
2010	6.96
2011	3.79
2012	4.30
2013	8.38

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2014

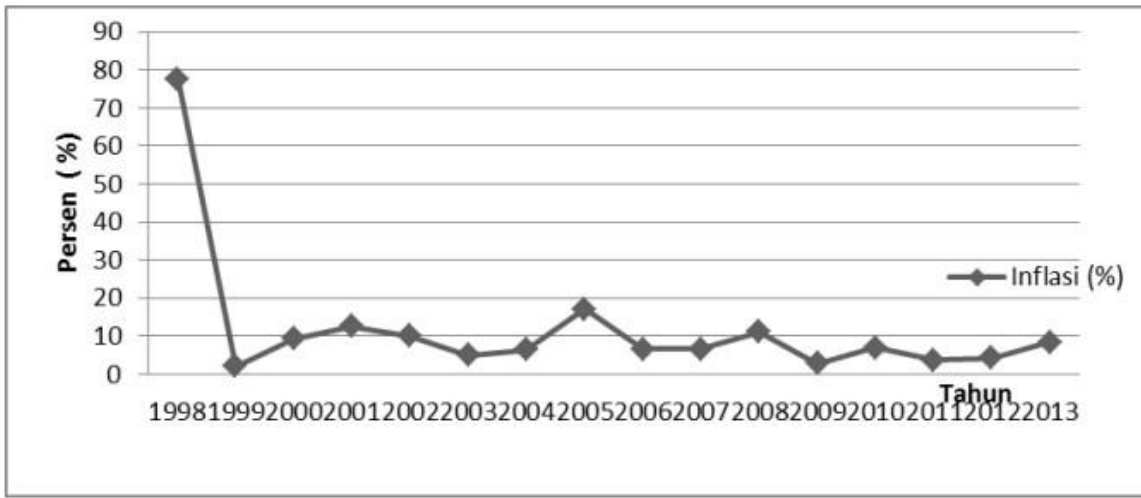
Krisis ekonomi juga menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi negara disertai dengan peningkatan inflasi. Munculnya inflasi tahun 1997 di Indonesia menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan inflasi secara signifikan. Imbas dari pada krisis ekonomi 1997 paling dirasakan dampaknya pada tahun 1998, dimana pertumbuhan ekonomi mencapai kontraksi dengan pertumbuhan minus 13,3%, hyperinflasi juga terjadi di Indonesia dengan tingkat inflasi 77,63%. Selanjutnya pada tahun 1999, laju inflasi sudah dapat dikendalikan seiring dengan membaiknya kondisi moneter di Indonesia menjadi sebesar 2,01%. Memasuki tahun 2000 stabilitas moneter cukup terkendali dengan tingkat inflasi sebesar 9,35%. Kemudian pada tahun 2001 dan 2002 inflasi masih tinggi pada yaitu pada angka 2 digit, kemudian inflasi mengalami penurunan pada tahun 2003 yakni sebesar 5,06% yang disebabkan semakin baiknya kinerja perekonomian Indonesia.

Inflasi tahun 2007 tercatat 6,59 persen. Tingkat inflasi yang relatif stabil bila dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat 6,60 persen, tidak terlepas dari perkembangan nilai tukar yang terjaga stabil, ketersediaan pasokan bahan makanan yang cukup, serta kenaikan harga-harga barang-barang yang dikendalikan pemerintah yang minimal. Keberhasilan tersebut juga merupakan hasil dukungan pemerintah dalam mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi, terutama yang bersumber dari kenaikan harga-harga komoditas internasional. Inflasi dalam perkembangannya menunjukkan angka yang meningkat mencapai di atas 11% pada akhir 2008 %. Inflasi sempat menurun hingga kisaran 2-3% pada 2009, tetapi kemudian meningkat lagi pada level 6,96% di akhir tahun 2010. Melanjutkan perkembangan di akhir tahun 2010, selama triwulan I 2011 inflasi masih berada di level yang tinggi, mendekati 7%, yang antara lain dipicu oleh tingginya inflasi *volatile food* dan inflasi inti. Laju inflasi Indonesia sepanjang tahun 2011 tercatat sebesar 3,79 persen. Tercapainya sasaran inflasi tahun

2012 yaitu sebesar 4,30 yang naik dari sedikit dari tingkat inflasi ditahun 2011 sebesar 3,79 tidak terlepas dari peran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mengendalikan tekanan yang bersumber dari faktor-faktor eksternal maupun domestik. Pelaksanaan kebijakan tersebut juga didukung oleh koordinasi kebijakan yang semakin solid baik di tingkat pusat maupun daerah.

Respon kebijakan tersebut dapat segera mengendalikan inflasi ke pola normal sejak september 2013 dan mendorong inflasi keseluruhan tahun 2013 sebesar 8,38 persen tidak melebihi angka dua digit seperti yang terjadi pada periode-periode saat terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi di tahun 2005 dan 2008. Kemudian untuk lebih jelasnya bisa dilihat grafik perkembangan inflasi di Indonesia periode 1998-2013 pada gambar 1 berikut:

Gambar 1. Perkembangan Inflasi di Indonesia periode 1998-2013



Sumber: BPS (data diolah), 2013

Pengendalian Inflasi

Pengendalian Inflasi begitu penting menjadi salah satu perhatian pemerintah karena inflasi bisa menyebabkan ketidakseimbangan sehingga memperburuk distribusi pendapatan dan berkurangnya tabungan domestik yang merupakan sumber dana investasi bagi negara-negara berkembang (Safitri 2021).

Secara konsep bahwa angka inflasi adalah angka yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga jasa dan barang di suatu wilayah. Dalam hal ini bukan berarti bahwa semua harga meningkat akan tetapi bisa saja hanya barang tertentu menurun atau malah tetap tidak menurun. Ada dua hal yang dapat menyebabkan naiknya harga barang dan jasa yakni permintaan meningkat dan supply tetap atau menurun atau sebaliknya (Yurianto 2020).

*Seperti halnya yang sering terjadi di negara berkembang, inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor struktural ekonomi daripada faktor kebijakan moneter. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa efek inflasi *cosh-push* lebih besar daripada inflasi tarikan permintaan.*

Secara umum, pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan moneter untuk mengendalikan tingkat harga secara umum. Pemerintah Indonesia lebih memilih menggunakan instrumen keuangan sebagai alat pengendalian inflasi, seperti mekanisme pasar terbuka dan giro wajib minimum. Pendekatan moneter, bagaimanapun, lebih umum digunakan untuk mengatasi inflasi dalam jangka pendek

dan diterapkan dengan sangat baik untuk ekonomi maju daripada ekonomi berkembang, yang masih memiliki hambatan struktural. Oleh karena itu, menggunakan pendekatan moneter ini sebagai alat utama pengendalian inflasi di negara berkembang tidak dapat menyelesaikan masalah inflasi di negara berkembang yang umumnya bersifat jangka panjang.

Sama halnya dengan Indonesia pada saat krisis mata uang yang kemudian berubah menjadi krisis ekonomi, inflasi Indonesia disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang impor (inflasi impor) dan peningkatan utang luar negeri akibat devaluasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan lainnya. negara asing. mata uang. Oleh karena itu, stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing harus dilakukan terlebih dahulu untuk meredakan tekanan inflasi terutama dolar AS.

Untuk menstabilkan nilai tukar, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan moneter ketat yang dirancang untuk mendorong pemegang valuta asing untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia melalui deposito dan menstabilkan tingkat harga secara keseluruhan. Mereka cenderung menggunakan lebih banyak alat keuangan melalui agen mereka.

Kebijakan moneter ketat yang diterapkan dengan menaikkan suku bunga SBI (melalui mekanisme pasar terbuka) sangat tinggi, efektif mengurangi jumlah uang beredar di satu sisi, dan menaikkan suku bunga kredit ke sektor riil di sisi lain. Hasilnya adalah cost-push inflation karena suku bunga dan spiral harga. Ketika bunga bank (simpanan) begitu tinggi sehingga alat produksi masyarakat (alat produksi atau usaha) juga masuk ke sektor perbankan, output suatu negara mungkin stagnan atau bahkan menurun (yang disebut efek Caballo). Selain itu, negative spread di dunia perbankan nasional berdampak negatif tidak hanya pada sektor riil, tetapi juga pada industri perbankan nasional (sektor uang).

Jika negara melanjutkan kebijakan ini dalam jangka menengah panjang, maka akan terjadi resesi ekonomi yang merusak struktur perekonomian nasional. Jika demikian halnya, kebijakan pengendalian inflasi harus dilaksanakan tidak hanya dengan perspektif moneter, tetapi juga dengan perspektif strukturalis yang meyakini bahwa hambatan struktural yang ada perlu diatasi.

Dengan berbagai hambatan dalam pembangunan perekonomian Indonesia yang telah disebutkan di atas, berdasarkan penelitian yang dilakukan Adwin S. Atmadja, seorang dosen Fakultas Ekonomi dalam Jurnalnya perlu dilakukan berbagai upaya, yaitu:

Meningkatkan *Supply* Bahan Pangan

Meningkatkan *supply* bahan pangan dapat dilakukan dengan lebih memberikan perhatian pada pembangunan di sektor pertanian, khususnya sub sektor pertanian pangan. Modernisasi teknologi dan metode pengolahan lahan, serta penambahan luas lahan pertanian perlu dilakukan untuk meningkatkan laju produksi bahan pangan agar tercipta swasembada pangan.

Mengurangi Defisit APBN

Mungkin dalam masa krisis ekonomi mengurangi defisit APBN tidak dapat dilaksanakan, tetapi dalam jangka panjang (setelah krisis berlalu) perlu dilakukan. Untuk mengurangi defisit anggaran belanja, pemerintah harus dapat meningkatkan penerimaan rutinnya, terutama dari

sektor pajak dengan benar dan tepat karena hal ini juga dapat menekan *excess demand*. Dengan semakin naiknya penerimaan dalam negeri, diharapkan pemerintah dapat mengurangi ketergantungannya terhadap pinjaman dana dari luar negeri. Dengan demikian anggaran belanja pemerintah nantinya akan lebih mencerminkan sifat yang *relative independent*.

Meningkatkan Cadangan Devisa

Pertama, perlu memperbaiki posisi neraca perdagangan luar negeri (*current account*), terutama pada perdagangan jasa, agar tidak terus menerus defisit. Dengan demikian diharapkan cadangan devisa nasional akan dapat ditingkatkan. Juga, diusahakan untuk meningkatkan kinerja ekspor, sehingga *net export* harus semakin meningkat.

Kedua, diusahakan agar dapat mengurangi ketergantungan industri domestik terhadap barang-barang luar negeri, misalnya dengan lebih banyak memfokuskan pembangunan pada industri hulu yang mengolah sumberdaya alam yang tersedia di dalam negeri untuk dipakai sebagai bahan baku bagi industri hilir. Selain itu juga perlu dikembangkan industri yang mampu memproduksi barang-barang modal untuk industri di dalam negeri.

Ketiga, mengubah sifat industri dari yang bersifat substitusi impor kepada yang lebih bersifat promosi ekspor, agar terjadi efisiensi di sektor harga dan meningkatkan *net export*.

Keempat, membangun industri yang mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan memiliki kandungan komponen lokal yang relatif tinggi pula.

Memperbaiki dan Meningkatkan Kemampuan Sisi Penawaran Agregat

Pertama, mengurangi kesenjangan output (*output gap*) dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya pekerja, modernisasi teknologi produksi, serta pembangunan industri manufaktur nasional agar kinerjanya meningkat. Kedua, memperlancar jalur distribusi barang nasional, supaya tidak terjadi kesenjangan penawaran dan permintaan di tingkat regional (daerah). Ketiga, menstabilkan tingkat suku bunga dan menyehatkan perbankan nasional, tujuannya untuk mendukung laju proses industrialisasi nasional. Keempat, menciptakan kondisi yang sehat dalam perekonomian agar market mechanism dapat berjalan dengan benar, dan mengurangi atau bahkan menghilangkan segala bentuk faktor yang dapat menyebabkan distorsi pasar. Kelima, melakukan program deregulasi dan debirokrasi di sektor riil karena acap kali birokrasi yang berbelit dapat menyebabkan *high cost economy*.

Dengan menggunakan dua pendekatan (*moneterist dan strukturalist*) pada komposisi yang tepat, maka diharapkan bukan saja dalam jangka pendek inflasi dapat dikendalikan, tetapi juga dalam jangka panjang. Dan, bila ada upaya yang serius untuk memperkecil atau bahkan menghilangkan hambatan-hambatan struktural yang ada, maka akan berakibat pada membaiknya fundamental ekonomi Indonesia.

Selain upaya diatas, berdasarkan penelitian terbaru oleh (S. Sundoro 2021) kebijakan yang dapat mengendalikan tingkat inflasi yaitu salah satunya dengan kebijakan *price control* atau mengendalikan harga (Laguerodie & Vergata, 2008). Perubahan harga pada komoditas pangan dapat memengaruhi tingkat inflasi seperti halnya yang terjadi di Serbia (radukic *et al.*, 2015; di Amerika Serikat (Capehart & Richardson, 2008) dan di Indonesia (Kurniawan, 2014). Harga pada komoditas pangan dianggap penting karena dengan semakin mahalnya harga maka dapat menciptakan inflasi.

KESIMPULAN

Teknik penulisan kesimpulan sama dengan teknik penulisan pada bagian sebelumnya. Kesimpulan disajikan dalam bentuk paragraf dan bukan poin-poin dan tidak ada lagi angka-angka statistik. Kesimpulan berisi intisari hasil penelitian dan saran. Saran berisi keterbatasan penelitian dan rekomendasi yang perlu dilakukan agar kajian selanjutnya dapat menghasilkan temuan yang lebih baik.

Jumlah uang beredar (JUB), pengeluaran pemerintah, dan suku bunga menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan inflasi di Indonesia. Jika JUB meningkat sedangkan pengeluaran pemerintah dan suku bunga menurun maka akan berdampak terhadap peningkatan inflasi di Indonesia. Begitupun sebaliknya, jika JUB menurun, pengeluaran pemerintah dan suku bunga meningkat maka akan berdampak pada penurunan tingkat inflasi di Indonesia. Inflasi yang meningkat juga akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini merupakan fenomena serius yang harus diperhatikan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan untuk upaya pengendalian inflasi yang tepat bukan hanya untuk jangka pendek tetapi untuk jangka panjang

Menyadari akan keterbatasan dan kekeliruan pada penelitian ini. Namun dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat. Untuk Peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis, penulis menyarankan agar memperluas penelitian dengan menambah variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan dan pengendalian inflasi dan menggunakan metode penelitian lain dalam mengolah dan menganalisis data agar menjadi variasi dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, S. Adwin. 1999. "INFLASI DI INDONESIA : SUMBER-SUMBER PENYEBAB DAN PENGENDALIANNYA." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1(1):54–67.
- Behera, Jagannath, and Alok Kumar Mishra. 2017. "The Recent Inflation Crisis and Long-Run Economic Growth in India : An Empirical Survey of Threshold Level of Inflation." *Journal f Macroeconomics and Public Finance* 1(6):105–32. doi: 10.1177/2277978717695154.
- Hung, Ho-fung, and Daniel Thompson. 2016. "Money Supply, Class Power, and In Lation : Monetarism Reassessed." *American Sociological Review* 1–20. doi: 10.1177/0003122416639609.
- Indriyani, Siwi Nur. 2016. "ANALISIS PENGARUH INFLASI DAN SUKU BUNGA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 2005-2015." *Jurnal Manajemen Bisnis* 4(2).
- S. Kewal, Suramaya. 2012. "Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Kurs, Dan Pertumbuhan PDB Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan." *Jurnal Ekonomi* 8(1):53–64.
- S. Sundoro, Hary. 2021. "PENGARUH HARGA KOMODITAS PANGAN DAN BENSIN TERHADAP TINGKAT INFLASI SELAMA PEMERINTAH JOKOWI." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 10(02):73–82.

S. Tambunan, Rexsy, Yusbar Yusuf, and Anthoni Mayes. 2015. "PENGARUH KURS, INFLASI, LIBOR DAN PDB TERHADAP FOREIGN SIRECT INVESTMENT (FDI) DI INDONESIA." *Jurnal Ekonomi* 23(1):59–84.

Safitri, Pipit Ani. 2021. "PENGENDALIAN INFLASI BERDASARKAN PANDANGAN UMER CHAPRA." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.